

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- B.Hestu Cipto Handayono. 2009. *Hukum Tata Negara Indonesia, Menuju Konsolidasi Sistem Demokrasi*. Admajaya. Yogyakarta.
- C.S.T. Kansil dan Christina S.T. Kansil. 1995. *Sistem Pemerintahan Indonesia*. Bumi Aksara. Jakarta.
- Eviandi Ibrahim. 2019. *Politik Hukum Otonomi Daerah Di Indonesia*. Wade Group. Ponorogo Jawa Timur.
- Fachri Hamzah. 2012. *Demokrasi, Transisi, Korupsi*. Faham Indonesia, Jakarta.
- Fadilah Putra. *Devolusi: Politik Desentralisasi sebagai Media Rekonsiliasi Ketegangan Politik Negara-Rakyat*. Pustaka Pelajar. Yogyakarta.
- F. Sugeng Istanto. 2009. *Beberapa Segi Hubungan Pemerintah Pusat dan Daerah Dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia*. Karyapuera. Yogyakarta.
- Hari Sabarno. 2007. *Otonomi Daerah Sebagai Fundamental Kebijakan*. Sinar Santika. Jakarta.
- Irfan Setiawan. 2018. *Handbook Pemerintahan Daerah*. Penerbit Wahana Resolusi. Yogyakarta.
- Judith N. Shklar. 2006. *Montesquieu Penggagas Trias Politika*. Grafiti. Jakarta.
- Miriam Budihardjo. 1986. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. PT Gramedia. Jakarta.
- Muhammad Fauzan. 2006. *Hukum Pemerintahan Daerah*. UII Press. Yogyakarta.
- Sarundajang. 2005. *Birokrasi Dalam Otonomi Daerah, Upaya Mengatasi Kegagalan*. Kata Hasta. Jakarta.

Siswanto Sunarno. 2012. *Hukum Pemerintahan Daerah Di Indonesia*. Sinar Grafika. Jakarta.

Titik Triwulan Tutuik. 2011. *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945*. Kencana Prenada Group. Jakarta.

Zainuddin Ali. 2019. *Metode Penelitian Hukum*. Sinar Grafika. Jakarta.

Zudan Arif Fakrulloh. 2001. *Ilmu Lembaga dan Pranata Hukum (Sebuah Pencarian)*. PT Raja Grafindo. Jakarta.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2018 tentang
Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat

C. Skripsi, Disertasi, Jurnal, dan Makalah

Angel Rabana and Jonh Haseman. 2002. *The Military And Democracy in Indonesia: Challenges, Politics And Power*. Calofornia RAND,s National Security Research Division (NSRD).

Bagir Manan dalam Zudan Arif Fakrulloh & Ninuk Triyanti. 2008. *Politik Hukum Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Bidang Pemerintahan Umum*. Makalah.

B.C. Smith. 1985. *Desentralization: The Territorial Dimension of The State*. Allen & Unwin Inc. Minchester.

Benyamin Hoessein. 1993. *Berbagai Faktor Yang Mempengaruhi Besarnya Otonomi Daerah Di Tingkat II Suatu Kajian Desentralisasi Dan Otonomi Daerah Dari Segi Ilmu Administrasi Negara*. Disertasi. PPS-UI. Jakarta.

Jayadi Nas Kamaluddin. 2002. *Otonomi Daerah dan Pemilihan Kepala Daerah*. Hasanuddin University Press.

Natalia Pransiska. 2019. *“Tugas Dan Kewenangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat Dalam Sistem Penyelenggaraan Pemerintahan Di Daerah (Studi Komparatif Terhadap Beberapa Undang-Undang Pemerintahan Daerah Pada Masa Orde Baru Hingga Pada Masa Reformasi)”*. Skripsi Universitas Sumatera Utara. Medan.

Ni Luh Putu Arianti dan A. A Ariani. *Kedudukan Dan Kewenangan Gubernur Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*. Universitas Udayana. Bali.

Philip Mawhod. 2007. *Lokal Government in the Third World: Experience of Tropical Afrika*. John Wiley & Sons. New York.

Wilda Prihatiningtyas. *Fungsi Gubernur Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Di Daerah*. Airlangga Development Journal. Surabaya.

Yuslim. 2014. “*Kewenangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten/Kota Menurut Undang-Undang Dasar 1945*”. Disertasi Doktor Universitas Andalas. Padang.

Yusuf Djabbar. “*Tinjauan Hukum Kedudukan Dan Fungsi Gubernur Menurut Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah*”. Jurnal Al-Adalah Vol. 3. Nomor 1. Januari 2018.

D. Internet

Edy Sutrisno. “*Konstruksi Tugas Dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah pusat Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah*”
http://digilib.mercubuana.ac.id/manager/t!@file_abstrak/Isi_Artikel_47318226_2115.pdf.

Eprints UNY. “*BAB III Kajian Teori, Tinjauan Otonomi Daerah*”.
<https://eprints.uny.ac.id/8631/3/BAB%202%20-%2008401241011.pdf>.

Repository UIN Suska. *"BAB III Kerangka Teoritis, Pengertian Otonomi Daerah"*.

<http://repository.uin-suska.ac.id/7120/4/BAB%20III.pdf>.

Repository Unpas. *"BAB III Kedudukan, Tugas, Dan Wewenang Gubernur Serta*

Cara

Pengisian

Jabatan

Gubernur"

<http://repository.unpas.ac.id/40146/4/BAB%20III.pdf>.

